

RENCANA KINERJA TAHUN 2023



**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN**

Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan Selatan
Telp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948

Email : kkp.banjarmasinnew@yahoo.co.id / Website : www.kkpbanjarmasin.or.id



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan Rahmat-NYA atas tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ini merupakan tahap keempat dari periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 – 2024, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ini selain menjelaskan tentang target dan hasil pencapaian kinerja kegiatan, realisasi anggaran dan rencana tindak lanjut atas permasalahan yang ditemui pada tahun sebelumnya, juga menjelaskan tentang target indikator kinerja kegiatan, rencana kegiatan dan alokasi anggaran kegiatan Tahun 2023, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan fokus dalam upaya pencapaian kinerja secara lebih optimal.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik untuk penyempurnaan rencana kinerja yang lebih baik dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kinerja ini.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ini dapat menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan selama Tahun 2023 dan bahan evaluasi atas target pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024 agar lebih relevan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan program kegiatan.



Banjarmasin, 18 Juli 2022

Kepala Kantor,

H. Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP 196709171990031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penulisan	4
II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	5
A. Capaian Indikator Kinerja TA. 2021	5
B. Alokasi Anggaran TA. 2021	5
C. Realisasi Anggaran TA. 2021	6
D. Rencana Tindak Lanjut TA 2021.....	8
E. Capaian Indikator Kinerja TA. 2022	9
F. Alokasi Anggaran TA. 2022	9
III. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023	13
A. Target Indikator Kinerja Kegiatan	13
B. Rencana Kegiatan	15
C. Alokasi Anggaran Kegiatan	20
IV. KESIMPULAN.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	5
Tabel 2	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2021	6
Tabel 3	Perbandingan Antara Realisasi Anggaran dan Capaian Output Kegiatan Tahun. 2021	6
Tabel 4	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan	7
Tabel 5	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022	9
Tabel 6	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2022	10
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Klasifikasi Rincian Output Kegiatan Tahun 2022 (Bulan Juni 2022)	10
Tabel 8	Perbandingan Antara Alokasi Anggaran dan Target Indikator Kinerja Kegiatan..... Tahun 2022 (Bulan Juni 2022)	12
Tabel 9	Perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dan 2022	14
Tabel 10	Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	14
Tabel 11	Alokasi Anggaran Per Kegiatan, KRO dan RO Tahun 2023	21
Tabel 12	Perbandingan Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 20223	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu cermin indikator utama keberhasilan pembangunan Indonesia. Hal ini mengingat *Human Development Index (HDI)*, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala global, pentingnya kesehatan masyarakat juga telah diangkat sebagai faktor utama dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa dalam upaya mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Perencanaan dan anggaran Program P2P disusun setiap tahun dengan mengacu pada dokumen RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA–KL) yang didalamnya memuat tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024.

Tahun anggaran 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Program P2P dalam periode pembangunan kesehatan lima tahunan periode 2020-2024. Pada akhir tahun periode ini semua target indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra harus dapat dicapai.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Program P2P selama tahun 2020-2022, menunjukkan bahwa rata-rata target indikator kinerja kegiatan telah dapat dicapai, walaupun dalam kondisi pandemic COVID-19 yang merebak sejak awal tahun 2020 dan mulai terkendali pada tahun 2022, kegiatan tetap dapat terlaksana karena adanya usaha dan kerja keras dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan melakukan penyesuaian beberapa kegiatan serta adanya kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang merupakan salah satu pilar penting dalam rangka menuju kualitas anggaran yang memiliki akuntabilitas, transparansi, serta bukti integritas yang tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih relevan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan pelabuhan dengan penyelarasan kegiatan hingga level Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dalam upaya mewujudkan visi dan misi Presiden.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan rencana kegiatan untuk mengatasi segala permasalahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja, maka KKP Kelas II Banjarmasin memandang perlu melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan agar penyusunan rencana

kerja anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta upaya-upaya yang dilaksanakan dapat lebih terarah.

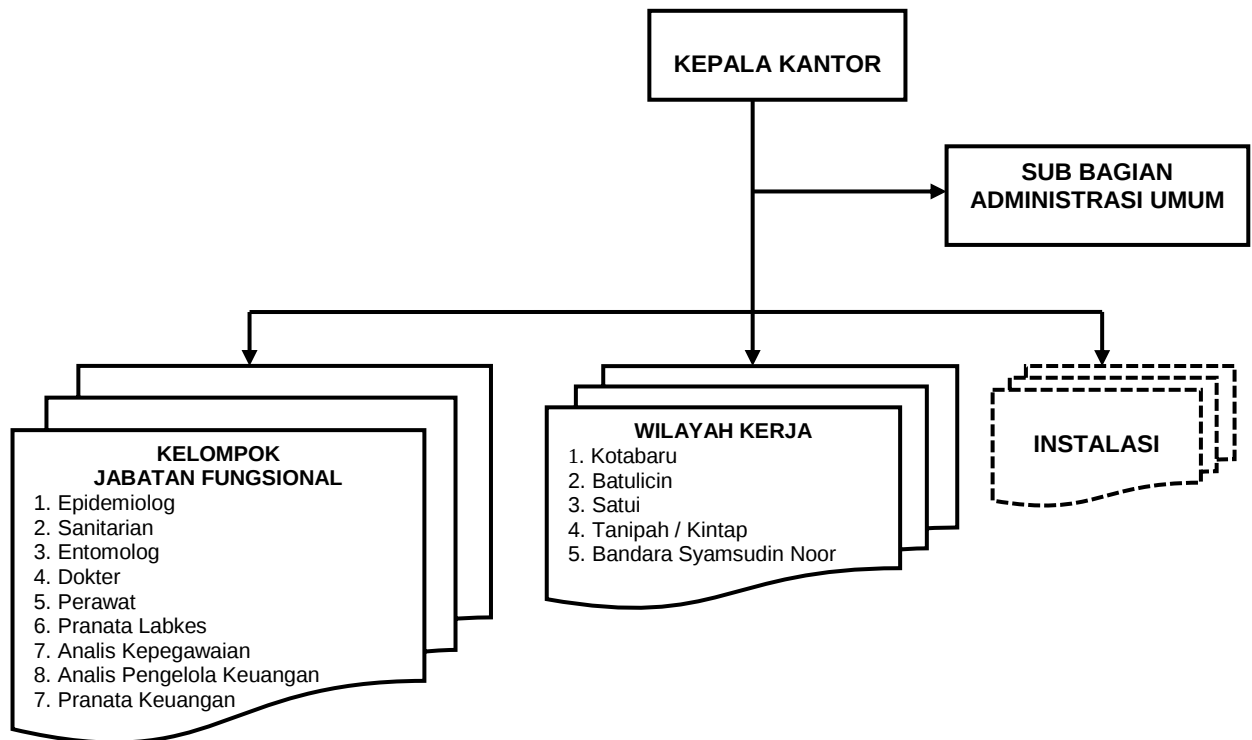
B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan rencana kinerja ini mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;
21. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi International;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/Per/IV/2003 tentang persyaratan rumah makan dan restoran;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman penyehatan sarana bangunan umum;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/ Menkes/Per/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLBD;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
36. International Health Regulation 2005.

C. STRUKTUR ORGANISASI



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan 2023 KKP Kelas II Banjarmasin terdiri dari :

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, struktur organisasi KKP Kelas II Banjarmasin dan sistematika penulisan.

4. BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang hasil pencapaian kinerja KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2021 dan target kinerja Tahun 2022, meliputi capaian indikator kinerja, capaian pelaksanaan anggaran dan rencana tindak lanjut.

5. BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Bab ini menguraikan tentang target indikator kinerja kegiatan, rencana kegiatan serta rencana dan alokasi anggaran kegiatan tahun 2023.

6. BAB IV KESIMPULAN

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja KKP Tahun 2021 Kelas II Banjarmasin serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA. 2021

Penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin dilaksanakan berpedoman pada rencana aksi kegiatan pada tahun 2020 - 2024. Setiap pelaksanaan kegiatan memiliki target indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya. Pada tahun 2019 indikator kinerja kegiatan mengalami revisi menyesuaikan dengan perubahan indikator rencana program Ditjen P2P. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,808,639	2,332,058	129
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	100%	105
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	90%	102%	112
2	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	Nilai kinerja anggaran	83	87.86	106
		Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	93	98.25	106
		Kinerja implementasi WBK satker	75	81.73	109
		Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	60%	75%	125

B. ALOKASI ANGGARAN TA. 2021

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan baik bersifat teknis maupun administratif dan biaya yang digunakan adalah berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 27 November 2020, dan terdapat revisi penambahan anggaran *Health Security* sebesar

Rp. 1,856,000,000,- yang disahkan pada tanggal 08 April 2021 sehingga total pagu menjadi Rp. 17,366,075,000,-. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan operasional pengawasan Covid-19 di pintu masuk terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 318.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021, sehingga total pagu menjadi Rp. 17,684,075,000. Mendekati akhir tahun, terdapat kelebihan alokasi anggaran Belanja Pegawai akibat adanya ASN yang mutasi keluar, pensiun, meninggal dunia dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN), sehingga dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 720,536,000,- sehingga total pagu menjadi Rp. 16,963,539,000,-. Adapun alokasi anggaran berdasarkan sumber pembiayaan yang terdiri dari RM dan PNBP dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2021

No	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran TA 2021
1	Rupiah Murni (RM)	13,989,676,000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2,973,863,000
	Jumlah	16,963,539,000

C. REALISASI ANGGARAN TA. 2021

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2021, KKP Kelas II Banjarmasin memperoleh capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun hasil realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3. Perbandingan Antara Realisasi Anggaran dan Capaian Output Kegiatan Tahun 2021

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output		Anggaran			Output		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah						
1	4249.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	873,415,000	857,995,350	98.23	878.500	878.500	100
2	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,103,136,000	1,056,352,474	95.76	579	579	100
3	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1,275,100,000	1,274,145,599	99.93	4	4	100
4	4249.TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	100,690,000	99,702,100	99.02	10	10	100
	Sub Jumlah		3,352,341,000	3,288,195,523	98.09			
B	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen P2P						
1	4815.EAA	Layanan Perkantoran	11,815,675,000	11,506,066,247	97.38	24	24	100
2	4815.EB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	90,240,000	89,166,494	98.81	2	2	100
3	4815.EAC	Layanan Umum	56,260,000	56,029,169	99.59	2	2	100
4	4815.EAD	Layanan Sarana Internal	842,551,000	835,953,000	99.22	67	67	100
5	4815.EAF	Layanan SDM	322,220,000	322,038,664	99.94	72	72	100
6	4815.EAG	Layanan Hukum	10,040,000	8,926,000	88.90	1	1	100

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output		Anggaran			Output		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
7	4815.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	10,190,000	10,084,800	98.68	3	3	100
8	4815.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	23,520,000	23,232,330	98.78	1	1	100
9	4815.EAJ	Layanan Data dan Informasi	120,000,000	120,000,000	100	1	1	100
10	4815.FAI	Pemantauan dan Evaluasi dan Pelaporan	203,340,000	203,309,439	99.98	19	19	100
11	4815.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	117,162,000	116,160,313	99.15	4	4	100
Sub Jumlah			13,611,198,000	13,274,642,019	97.53			
Total			19,963,539,000	16,562,837,542	97.64			

Berdasarkan tabel di atas, antara realisasi anggaran dengan capaian output kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin rata-rata berbanding lurus yaitu realisasi anggaran di atas 97% dan realisasi rincian output seluruhnya adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya dilakukan efisiensi anggaran dan optimalisasi kegiatan untuk mencapai suatu output kegiatan.

Selain itu, realisasi anggaran dapat dilihat dari perbandingan dengan capaian indikator kinerja kegiatan, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeharantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekeharantinaan kesehatan	1,808,639	2,332,058	129	3,005,821,000	2,971,041,949	98.84
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	100%	105	245,830,000	217,451,474	88.46
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	90%	107.87%	120	100,960,000	99,702,100	99.02
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	83	87.86	106	413,580,000	412,475,933	99.73
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran	93	98.25	106	12,275,388,000	12,441,855,123	97.39
		6. Kinerja implementasi WBK satker	75	81.73	109	100,010,00	98,272,299	98.26
		7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	60%	74.79%	125	322,220,000	322,038,664	99.94

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran dari 7 indikator kinerja kegiatan rata-rata > 95 % dengan realisasi anggaran yang tertinggi yaitu pada indikator kinerja kegiatan Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 99.94 % dan capaian kinerja sebesar 125 %. Sedangkan realisasi anggaran terendah pada indikator kinerja kegiatan Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 88.46 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 105 %. Apabila dilihat dari capaian kinerja tertinggi yaitu indikator kinerja kegiatan Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan sebesar 129 % dengan realisasi anggaran sebesar 98.84 % dan terendah pada indikator kinerja kegiatan Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan sebesar 105 % dengan realisasi anggaran sebesar 88.46 %. Hasil pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya pandemic covid-19 yang mengakibatkan peningkatan pengawasan di pintu masuk, sinergitas dari semua pengelola program dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran menjadi lebih optimal. Selain itu, menunjukkan bahwa kinerja dapat dilaksanakan dengan baik melebihi dari target yang ditetapkan dan dapat dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk capaian kinerja lebih dari 100 % serta optimalisasi kegiatan melalui realokasi anggaran untuk peningkatan capaian kinerja.

D. RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN TA. 2021

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dari bulan Januari – Desember 2021 terlihat bahwa pencapaian masing-masing indikator semua tercapai > 100%.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja agar berkesinambungan hingga tahun-tahun berikutnya, maka diperlukan rencana tindak lanjut untuk kegiatan yang belum tercapai atau yang memerlukan upaya optimalisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan advokasi dengan lintas sector dan lintas program terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi dari pengelola program kantor induk ke pengelola program di wilayah kerja pelaksanaan program kegiatan.
3. Peningkatan optimalisasi kegiatan untuk meningkatkan capaian output kegiatan.
4. *Transfer of knowledge* dan inovasi program-program kegiatan oleh pengelola kegiatan yang telah dilatih sehingga dapat meningkatkan system pelayanan dan adanya diferensiasi program kegiatan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
5. Penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana kegiatan secara merata pada seluruh wilayah kerja sesuai kapasitas dan kebutuhan pelaksanaan program di masing-masing wilayah kerja.
6. Komitmen bersama dari pejabat hingga pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan RPK dan RPD yang telah disusun dan disepakati bersama.

E. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA. 2022

Capaian kinerja Tahun 2022 yang dilakukan pendataan hingga bulan Juni 2022 sebelum penyusunan RKT Tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin dilaksanakan berpedoman pada Rencana Aksi Kegiatan pada tahun 2020 - 2024. Adapun indikator kinerja kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 (Bulan Juni 2022)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2022	Capaian Kinerja Juni 2022	%
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,998,906	1,636,207	81,86
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	100.00%	103,09
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	95%	38.47%	40,49
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	85	28.95	34,06
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93	91.60	98,49
		Kinerja implementasi WBK satker	75	81.44	108,59
		Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	32.33%	40,41

Dari data tersebut di atas, menggambarkan hingga triwulan I bahwa terdapat 1 indikator kinerja kegiatan yang tercapai > 100%, sedangkan indikator < 50 % terdapat 2 indikator kinerja kegiatan yang masih perlu upaya peningkatan hingga dapat tercapai secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan pada Bulan Desember 2022.

F. ALOKASI ANGGARAN TA. 2022

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan baik bersifat teknis maupun administratif dan biaya yang digunakan adalah berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 17 November 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21,812,095,000,- Adapun rincian alokasi anggaran kegiatan Tahun 2020 berdasarkan sumber pembiayaan seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 6. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan
Tahun 2022**

No	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran
1	Rupiah Murni (RM)	17,599,611,000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4,212,484,000
	Jumlah	21,812,095,000

G. REALISASI ANGGARAN TA. 2022

Pelaksanaan anggaran TA. 2022 hingga bulan Juni 2022 dapat dilihat berdasarkan perbandingan antar Kegiatan, KRO dan RO serta target output kegiatan, seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 7. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian
Klasifikasi Rincian Output Kegiatan Tahun 2022 (Bulan Jun 2022)**

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output		Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Target KRO	Realisasi KRO	% Progress
A	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah						
1	4249.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat						
	011	Pelayanan Kesehatan Haji	599,096,000	248,480,000	41,48	3500	2512	50
	012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara	185,979,000	64,679,080	34,78	10000	5299	58
2	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya						
	016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	175,842,000	28,555,400	16,24	2	1	50
	017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	289,650,000	125,928,800	43,48	2	1	50
	U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	120,000,000	33,150,000	27,63	200	55	50
	U04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	174,600,000	4,640,000	2,66	120	30	60
	U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	40,318,000	4,310,000	10,69	38	22	55
	U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes	162,099,000	48,522,000	29,93	63	37	59
	U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	9,093,000	4,200,000	46,19	21	18	86
	U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	28,800,000	12,450,000	43,23	90	48	53
	U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	20,076,000	3,000,000	14,94	12	4	35
	U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	8,960,000	6,020,000	67,19	28	19	71
	U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	15,125,000	7,500,000	49,59	5	4	80

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output		Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Target KRO	Realisasi KRO	% Progress
	U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	45,550,000	15,061,400	33,07	10	5	70
	U18	Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan (katagori II)	10,740,000	1,890,000	17,60	12	2	32
3	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan						
	001	Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk	570,032,000	394,376,345	69,18	4	1	65
4	4249.TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal						
	001	Pelatihan Kesehatan	121,720,000	9,987,200	8,21	11	6	25
	Sub Jumlah		2,577,680,000	1,012,750,225	39,29			
B	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen P2P						
1	4815.AEA	Koordinasi						
	502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	320,520,000	65,086,900	20,31	4	0	50
2	4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
	956	Layanan BMN	49,270,000	600,000	1,22	2	1	50
	957	Layanan Hukum	12,790,000	11,473,780	89,71	1	1	90
	958	Layanan Hubungan Masyarakat	72,670,000	3,474,000	4,78	1	1	50
	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	10,090,000	875,000	8,67	1	1	50
	962	Layanan Umum	73,132,000	499,545	0,68	1	0	27
	994	Layanan Perkantoran	13,996,665,000	5,458,819,770	39	12	6	50
3	4815.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
	951	Layanan Sarana Internal	1,413,060,000	0	0	1	0	33,5
	971	Layanan Prasarana Internal	2,856,880,000	32,900,000	1,15	1	0	80
4	4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
	954	Layanan Manajemen SDM	103,522,000	19,982,181	19,30	70	36	51
	956	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	69,358,000	0	0	7	0	70
5	4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal						
	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	103,520,000	989,250	0,96	2	1	50
	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	48,710,000	2,180,500	4,48	19	11	58
	955	Layanan Manajemen Keuangan	75,163,000	5,035,600	6,70	2	1	50
	974	Layanan Penyelenggaraan Kerasipan	29,065,000	26,869,501	92,45	1	0	75
	Sub Jumlah		19,234,415,000	5,641,618,825	29,33			
	Total		21,812,095,000	6,654,369,050	30,51			

Sehubungan masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan, sehingga realisasi anggaran dan output kegiatan progresnya masih belum signifikan, namun selama triwulan 1 pelaksanaan

kegiatan belum ditemukan kendala berarti atau tahapan pelaksanaan kegiatan masih dengan RPK dan RPD.

Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan per indikator kinerja kegiatan kegiatan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Perbandingan Antara Alokasi Anggaran dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 (Bulan Juni 2022)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,998,906	1,636,207	81,86	1,925,367,000	926,017,625	48,07
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	100.00%	103,09	530,593,000	76,745,400	14,46
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	95%	38.47%	40,49	121,720,000	9,987,200	8,21
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85	28.95	34,06	483,550,000	68,256,650	14,12
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran	93	91.60	98,49	18,384,078,000	5,497,355,370	29,90
		6. Kinerja implementasi WBK satker	75	81.44	108,59	193,907,000	56,024,624	28,89
		7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	32.33%	40,41	172,880,000	19,982,181	11,56

Berdasarkan data tersebut di atas, dari 7 indikator kinerja kegiatan terdapat 1 indikator yaitu Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang tercapai > 100%, sedangkan 2 indikator kinerja yang tercapai < 50% masih dalam proses pelaksanaan kegiatan dan sebagian output baru dapat dicapai pada triwulan 3 dan 4.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

A. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2023 disusun mengikuti kebijakan redesain sistem penganggaran Kementerian / Lembaga merupakan salah satu pilar penting dalam rangka menuju kualitas anggaran yang memiliki akuntabilitas, transparansi, serta bukti integritas yang tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Hal ini merupakan kunci atas ketertiban, kedisiplinan sistem penganggaran. Rencana Kinerja Tahunan merupakan upaya dasar pelaksanaan kegiatan selama satu tahun dan menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan 2 tahun mendatang selama periode jangka menengah. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun agar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sesuai sasaran dan target indikator sasaran Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2020-2024.

Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) sebagai dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang merupakan bagian integral dari Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara Nasional. Dokumen ini mengalami beberapa perubahan antara lain penyesuaian perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru, adanya revisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI, hasil reviu SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang menyatakan masih ada indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi metode *SMART (Specific, Measurable, Attainable/Achievable, Relevant, Time Bound)*, sehingga terdapat perubahan nomenklatur dan target indikator kinerja kegiatan serta pemahaman terhadap sumber data indikator kinerja kegiatan untuk setiap Kantor Kesehatan Pelabuhan masih belum sama. sehingga terdapat perubahan nomenklatur indikator kinerja 1 dan 7 serta penyesuaian target kinerja sesuai dengan definisi operasional dan cara perhitungan target kinerja.

Mengacu pada hal tersebut di atas, maka pada Tahun 2022 terdapat perubahan nomenklatur indikator kinerja 1 dan 7 serta penyesuaian target kinerja sesuai dengan definisi operasional dan cara perhitungan target kinerja. Hal ini bertujuan kinerja yang ditetapkan memenuhi kategori indikator yang sesuai standar dengan penetapan target kinerja yang lebih tepat dalam upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan faktor risiko di pintu masuk. Adapun perubahan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 9. Perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan
Tahun 2020,2021, dan 2022**

No	Uraian	Semula (2020)	Menjadi (2021 Awal)	Menjadi (2021 Revisi I)	Menjadi (2022 Revisi II)	Keterangan
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		Penguatan Peran dan Fungsi KKP di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
		Meningkatnya tata kelola manajemen KKP		Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran			Kebijakan relaksasi IKPA Tahun 2020, sehingga indikator dilakukan perubahan
		Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan			Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	Berdasarkan hasil reuiu SAKIP oleh Inspektorat Jenderal ada beberapa indikator yang masih belum memenuhi kriteria SMART (terutama di <i>specific</i>) sehingga dilakukan penyamaan pemahaman persepsi indikator dan sumber data pada Tahun 2022
		Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Bahasa indikator masih bersifat proses

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tahun 2023 indikator kinerja kegiatan target yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 10. Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	0,96
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0,81
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	84
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

B. RENCANA KEGIATAN

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus dibarengi dengan penyusunan rencana kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan. Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024. Namun, Tahun 2023 terdapat kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, sehingga rencana kegiatan Tahun 2023 bersifat sebagai tahap lanjutan pelaksanaan perubahan sistem yang akan mempengaruhi rencana kegiatan pada masa 1 tahun kedepan. Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan KKP Kelas II Banjarmasin pada tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN

- a. Persentase Orang Yang Diperiksa Sesuai Standar
- b. Persentase Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar
- c. Persentase Barang Yang Diperiksa Sesuai Standar
- d. Persentase Lingkungan Yang Diperiksa Sesuai Standar

2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

- a. Faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang
- b. Faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan alat angkut
- c. Faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan barang
- d. Faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan lingkungan
- e. Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang
- f. Faktor Risiko yang dikendalikan pada alat angkut
- g. Faktor Risiko yang dikendalikan pada barang
- h. Faktor Risiko yang dikendalikan pada lingkungan

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

- a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%
- b. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1
- c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)
- d. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2
- e. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2
- f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0
- g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1
- h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
- i. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan

- j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

4. Nilai kinerja anggaran

Menggunakan aplikasi E-Monev DJA

5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Menggunakan kriteria penilaian nilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satker melalui aplikasi OMSPAN

6. Kinerja implementasi WBK Satker

Hasil penilaian Tim Hukormas Ditjen P2P dan Tim Penilai Internal Kemenkes RI

Sedangkan berdasarkan redesain sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO) / Komponen / Sub Komponen yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

a Koordinasi

1) Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)

a) Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pelabuhan/Bandara/PLBD

(1) Rapat Kekarantinaan Kesehatan dengan LP LS

(2) Bimtek / Monev Program P2P ke Wilayah Kerja

b Pelayanan Publik kepada Masyarakat

1) Pelayanan Kesehatan Haji

a) Pelayanan Kesehatan Haji di Bandara

(1) Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi (Rapat Koordinasi Persiapan)

(2) Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi (Pemantapan Higiene Sanitasi pangan Penjamah Makanan Catering Haji)

(3) Pelayanan Kesehatan Embarkasi

(4) Pelayanan Kesehatan Debarkasi

(5) Pelayanan Kesehatan Debarkasi (Rapat Evaluasi Pelaksanaan Debarkasi)

2) Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/bandara/Lintas Batas

a) Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat

(1) Pelayanan Vaksinasi

(2) Verifikasi Terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang Mengajukan Persetujuan Penerbitan ICV

(3) Pengawasan Terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang Melaksanakan Penerbitan ICV

(4) Pertemuan Evaluasi Fasilitas Kesehatan Penerbitan ICV

c Pelayanan Publik Lainnya

- 1) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
 - a) Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
 - (1) Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan TPM Pra Embarkasi
 - (2) Pemeriksaan dan Pengendalian Sanitasi Lingkungan Asrama Haji
 - (3) Survey dan Pengendalian Vektor dan BPP di Asrama Haji
 - (4) Pengawasan / Pemeriksaan Kualitas Air di Pelabuhan dan Bandara
 - (5) Pemeriksaan Kualitas Makanan di Pelabuhan dan Bandara
 - (6) Pemeriksaan Kualitas Tempat-Tempat Umum di Pelabuhan dan Bandara
 - (7) Pemeriksaan Kualitas Udara dan Kebisingan di Pelabuhan dan Bandara
 - (8) Pengawasan dan Pengendalian Limbah B3 di Pelabuhan
 - (9) Uji Resistensi Insektisida
 - (10) Pengelolaan Limbah Medis
- 2) Layanan Pemeriksaan Orang, Barang dan Alat Angkut
 - a) Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut
 - (1) Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan dan Bandara
- 3) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara (SBK)
- 4) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus (SBK)
- 5) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD (SBK)
- 6) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes (SBK)
- 7) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare (SBK)
- 8) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD (SBK)
- 9) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria (SBK)
- 10) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare (SBK)
- 11) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS (SBK)
- 12) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB (SBK)
- 13) Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria (SBK)

d Sarana Bidang Kesehatan

- 1) Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk
 - a) Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan
 - (1) Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP
 - (2) Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan
 - (3) Pengadaan Bahan Alat Bahan Medis dan non Medis Untuk Pelayanan
 - (4) Sarana dan Prasarana Pengawasan di Pintu Masuk

e Layanan Manajemen SDM Internal

- 1) Pelatihan Kesehatan
 - a) Pelatihan Bidang Kesehatan

- (1) Peningkatan Kapasitas SDM Sanitarian dan Entomolog
- (2) Peningkatan Kualitas SDM Kualifikasi Karantina Kesehatan dan Sirveilans Epidemiologi
- (3) Peningkatan Kualitas SDM Kualifikasi Tenaga Medis dan Paramedis
- (4) *Refreshing* Tim TGC dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Berpotensi KKM

2. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- a. Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - 1) Layanan BMN
 - a) Pengelolaan BMN
 - (1) Penyusunan Laporan BMN
 - (2) Penghapusan dan Pemusnahan BMN
 - (3) Penyelesaian Masalah BMN
 - (4) Penyusunan RKBMN
 - 2) Layanan Hukum
 - a) Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P
 - (1) Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System
 - (2) Pengendalian Gratifikasi
 - (3) Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS Ditjen P2P
 - 3) Layanan Hubungan Masyarakat
 - a) Pelayanan Humas dan Protokoler
 - (1) Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
 - (2) Desiminasi / Promosi Informasi Kegiatan Melalui Media Cetak
 - 4) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - a) Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - (1) Reviu Data Klasifikasi UPT
 - (2) Penyusunan dan Reviu ABK, Peta dan Informasi Jabatan
 - (3) Penyusunan / Monev SOP AP UPT
 - (4) Pembangunan Zona Integritas Menuju Satker WBK, Penguatan dan Pendampingan Assessment Penilaian Satker WBK/WBBM
 - 5) Layanan Umum
 - a) Layanan Umum dan Perlengkapan
 - (1) Langganan Aplikasi *Meeting* Berbayar
 - (2) Pengelolaan Kantor BERHIAS
 - (3) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
 - (4) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- (5) Sewa Kendaraan
 - (6) Pemeriksaan Kesehatan ASN
- 6) Layanan Perkantoran
 - a) Gaji dan Tunjangan
 - (1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS
 - (2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK
 - b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - (1) Pelaksanaan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
 - (2) Langganan Daya dan Jasa
 - (3) Pemeliharaan Perkantoran
 - (4) Pelaksanaan Operasional Perkantoran
- b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - 1) Layanan Prasarana Internal
 - a) Pembangunan Gedung
 - (1) Pembangunan Kantor Wilker Batulicin
- c. Layanan Manajemen SDM Internal
 - 1) Layanan Manajemen SDM
 - a) Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P
 - (1) Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai
 - (2) Peningkatan Kompetensi Pegawai
 - (3) Layanan Mutasi Kepegawaian
 - (4) Pembinaan Pegawai
 - 2) Layanan Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Ditjen P2P
 - (1) Diklat / Seminar / Kursus Dukungan Manajemen
- d. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
 - a) Rencana Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Dukungan Manajemen
 - (1) Penyusunan RKA-KL
 - (2) Pembahasan dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Revisi Anggaran
 - (3) Penyusunan RAK
 - 2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - a) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program

- (1) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program
 - (2) Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran
 - (3) Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas / PP 39 Tahun 2006
 - (4) Penyusunan Laporan Tahunan Satker
 - (5) Penyusunan Laporan Indikator RAK
 - (6) Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja
 - (7) Evaluasi SAKIP
- 3) Layanan Manajemen Keuangan
 - a) Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P
 - 1) Penyusunan Laporan Keuangan (Semester II TA. 2022)
 - 2) Penyusunan Laporan Keuangan Komprehensif (Triwulan III TA. 2023)
 - 3) Penyusunan Laporan Keuangan (Semester I TA. 2023)
 - b) Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P
 - 1) Pencairan Anggaran dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LS,UP,TUP)
 - 4) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
 - a) Penyelenggaraan Kearsipan
 - b) Penataan Persuratan dan Kearsipan
 - c) Penyusutan Arsip di Lingkungan Ditjen P2P

C. ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan jumlah tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Anggaran yang direncanakan baik bersifat teknis maupun administratif yang berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2023 telah mengikuti kebijakan redesain sistem penganggaran Kementerian / Lembaga yang merupakan salah satu pilar penting dalam rangka menuju kualitas anggaran yang memiliki akuntabilitas, transparansi, serta bukti integritas yang tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Alokasi anggaran pada awal tahun sebesar **Rp. 23,530,669,000,-** yang terbagi dalam 2 (dua) kegiatan utama yaitu Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Anggaran mengikuti redesain belanja yang terdiri atas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) yang telah ditetapkan. Adapun rincian alokasi anggaran kegiatan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 11. Alokasi Anggaran Per Kegiatan, KRO dan RO
Tahun 2023**

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output		Alokasi Anggaran
A.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
1	4249.PEA	Koordinasi	72,930,000
	4249.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	72,930,000
2	4249.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	866,035,000
	4249.QAA.011	Pelayanan Kesehatan Haji	677,545,000
	4249.QAA.012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	208,490,000
3	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	944,703,000
	4249.QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	103,738,000
	4249.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	38,880,000
	4249.QAH.U02	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	204,000,000
	4249.QAH.U04	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus	174,600,000
	4249.QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	42,712,000
	4249.QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes	162,855,000
	4249.QAH.U09	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	38,400,000
	4249.QAH.U11	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	32,640,000
	4249.QAH.U12	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	18,240,000
	4249.QAH.U13	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	38,400,000
	4249.QAH.U14	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	25,480,000
	4249.QAH.U15	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	54,150,000
	4249.QAH.U20	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria	17,400,000
4	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1,816,630,000
	4249.RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	1,816,630,000
5	4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	365,180,000
	4249.TBC.001	Pelatihan Bidang Kesehatan	365,180,000
	Sub Jumlah		4,085,478,000
B.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
1	4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,559,734,000
	4815.EBA.956	Layanan BMN	51,810,000
	4815.EBA.957	Layanan Hukum	15,580,000
	4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	38,970,000
	4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	9,900,000
	4815.EBA.962	Layanan Umum	256,522,000
	4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	14,315,489,000
2	4815.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,057,150,000
	4815.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	4,057,150,000
3	4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	154,720,000
	4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	79,310,000
	4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	75,410,000

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output		Alokasi Anggaran
4	4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	545,050,000
	4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	106,140,000
	4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	345,240,000
	4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	64,080,000
	4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	29,590,000
	Sub Jumlah		19,445,191,000
	Total		23,530,669,000

Dari Tabel di atas, apabila dibandingkan dengan anggaran Tahun 2022, tidak terdapat perbedaan nomenklatur output dari tahun sebelumnya, hanya terdapat perbedaan satuan harga (*unit cost*) untuk alokasi anggaran SBK.

Apabila dibandingkan sasaran strategis dan target indikator kinerja kegiatan dengan distribusi alokasi anggaran dapat digambarkan berdasarkan alokasi kegiatan yang sesuai dengan kinerja yang akan dicapai seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Perbandingan Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2023

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN YANG Mendukung	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	0,96	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk dan Wilayah	4,085,478,000
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%		
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0,81		
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	84	Dukungan Manajemen Pelaksanaan program Di Ditjen P2P	19,445,191,000
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90		
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75		
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%		

BAB IV

KESIMPULAN

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin mempunyai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2021, dari 7 indikator kinerja kegiatan, semua tercapai lebih dari 100 % dengan total realisasi anggaran sebesar 97,64 %. Sedangkan Tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga periode Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024, karena adanya beberapa perubahan antara lain penyesuaian perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru, adanya revisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI, hasil revaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang menyatakan masih ada indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi metode *SMART (Specific, Measurable, Attainable/Achievable, Relevant, Time Bound)*, sehingga terdapat perubahan nomenklatur dan target indikator kinerja kegiatan serta pemahaman terhadap sumber data indikator kinerja kegiatan untuk setiap Kantor Kesehatan Pelabuhan masih belum sama, sehingga terdapat perubahan nomenklatur indikator kinerja 1 dan 7 serta penyesuaian target kinerja sesuai dengan definisi operasional dan cara perhitungan target kinerja.

Hasil capaian kinerja Tahun 2022 hingga Bulan Juni 2022 sebelum disusunnya RKT Tahun 2023, dari 7 indikator kinerja kegiatan terdapat 1 indikator kinerja kegiatan yang tercapai > 100%, sedangkan indikator < 50 % terdapat 2 indikator kinerja kegiatan yang masih perlu upaya peningkatan hingga dapat tercapai secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan, sedangkan, realisasi anggaran sebesar 30,51 %. Berdasarkan hasil capaian ini, hingga akhir Tahun 2022 diperkirakan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan dukungan berbagai sumber daya dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, yang merupakan tahapan lanjutan dari Tahun 2022 dalam upaya mencapai target indikator kinerja kegiatan hingga akhir tahun 2024 sesuai Rencana Aksi Kegiatan periode 2020-2024. Berbagai penyesuaian telah dilakukan untuk mendorong percepatan pencapaian indikator kinerja program. Tersusunnya Rencana Kinerja Tahun 2023 diharapkan akan menjadi dasar kelanjutan pelaksanaan kegiatan hingga 2 tahun mendatang seiring dengan kebijakan redesign sistem perencanaan dan penganggaran yang merupakan salah satu pilar penting dalam rangka menuju kualitas anggaran yang memiliki akuntabilitas, transparansi, serta bukti integritas yang tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih relevan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan pelabuhan dengan penyelarasan kegiatan hingga level Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dalam upaya mewujudkan visi dan misi Presiden.

Untuk dapat mencapai target kinerja kegiatan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin pada Tahun 2023 dan tahun berikutnya, didukung dengan kinerja yang lebih baik, optimal dan profesional, serta penguatan kepatuhan internal dalam pengawasan dan evaluasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Hal ini tentunya perlu didukung dengan peningkatan kompetensi kualitas SDM agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, peningkatan jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.

SISTEMATIKA RENCANA KERJA TAHUNAN TA. 2023

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/Satker	:	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin
Program	:	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program	:	1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit 2. Menurunnya infeksi penyakit HIV 3. Menurunnya insiden TBC 4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 5. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta 6. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular 7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun 8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun 9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat 10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium 11. Meningkatnya pengelolaan kedaruratan Kesehatan masyarakat

I. Sasaran Kegiatan dan Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	0,96	4,085,478,000
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0,81	
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	84	19,445,191,000
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	
		Kinerja implementasi WBK satker	75	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	

II. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun Berjalan dan Prakiraan Maju)

No	Sasaran / IKK / Kegiatan / KRO / RO / Komponen	Tahun 2023			Prakiraan Maju								
		Volume	Satuan	Alokasi (Juta)	Volume				Alokasi (Juta)				
					2020	2021	2022	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah								16.348.746	16,963,539	21,812,095	17,289,150	18,339,300
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	-	-	-	1,001,644	1,808,639	1,998,906	-	2.978.750	3,352,341	2,577,680	3,935,478	2,778,950
	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	0,96	Poin	3,008,480	-	-	0,95	0,97					
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100	%	561,478	90	95	99	100					
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,81	%	365,520	85	90%	0,80	0,82					
	Kegiatan / KRO / RO :												
	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wlayah												
	Koordinasi	11	Kegiatan	72,930									
	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	11	Kegiatan	72,930									
	Pelayanan Publik Pada Masyarakat	23,500	Orang	886,035	13,500	13,500	23,500	23,500	828,513	738,415	960,557	772.631	849.894
	Pelayanan Kesehatan Haji	3,500	Orang	677,545	3,500	3,500	3,500	3,500	755,510	550,520	702,392	283.982	312.380
	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	20,000	Orang	208,490	10,000	10,000	20,000	20,000	73,003	187,895	258,165	1.210.877	1.331.964
	Pelayanan Publik Lainnya	871	Layanan	944,703	603	603	871	871	1,711,347	920,136	1,100,797	187.704	206.474
	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	9	Layanan	103,738	2	2	9	9	117,760	182,994	170,640	318.615	350.477
	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	30	Layanan	38,880	2	2	30	30	1,042,180	137,600	289,650	132.000	145.200
	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	255	Layanan	204,000	200	200	255	255	60,000	120,000	120,000	192.060	211.266
	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus	120	Layanan	174,600	120	120	120	120	145,500	130,950	174,600	44.350	48.785
	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	38	Layanan	42,712	38	38	38	38	40,318	40,318	40,318	183.970	202.366

No	Sasaran / IKK / Kegiatan / KRO / RO / Komponen	Tahun 2023			Prakiraan Maju								
		Volume	Satuan	Alokasi (Juta)	Volume				Alokasi (Juta)				
					2020	2021	2022	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes	63	Layanan	162,855	63	63	63	63	167,245	167,245	167,245	10.002	11.003
	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	72	Layanan	31,608	21	21	72	72	9,093	9,093	9,093	31.680	34.848
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	102	Layanan	32,640	90	90	102	102	28,800	28,800	28,800	22.084	24.292
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	12	Layanan	18,240	12	12	12	12	20,076	20,076	20,076	9.856	10.842
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	120	Layanan	38,400	28	28	120	120	8,960	8,960	8,960	16.638	18.301
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	20	Layanan	25,480	5	5	20	20	15,125	15,125	15,125	50.105	55.116
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	10	Layanan	54,150	10	10	10	10	45,550	45,550	45,550	11.814	12.995
	Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan	20	Layanan	17,400	12	12	12	12	10,740	13,425	10,740	772.455	849.701
	Sarana Bidang Kesehatan	4	Paket	1,816,630	4	4	4	4	178,885	191,100	702,232	772.455	849.701
	Pengadaan Alat dan Bahan kekarantinaaan Kesehatan di Pintu Masuk	4	Paket	1,816,630	4	4	4	4	178,885	191,100	702,232	207.515	228.267
	Layanan Manajemen SDM Internal	24	Orang	365,180	11	11	24	24	120,945	100,690	188,650	207.515	228.267
	Pelatihan Kesehatan	24	Orang	365,180	11	11	24	24	120,945	100,690	188,650	772.631	849.894
B	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
4	Nilai kinerja anggaran	84	Poin	464.840	80	83	83	85	13.369.996	13,611,198	19,234,415	18,208,266	15,560,350
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	-	-	-	80%	-	-	-					
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90	Poin	17.240.944	-	93	90	90					
6	Kinerja implementasi WBK satker	75	Poin	349.362	70	72	75	75					
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	%	153.120	45%	80%	80%	80%					
	Kegiatan / KRO / RO :												
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
	Koordinasi	31	Layanan	14,688,271			10	4			320,520	320,520	348,360
	Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Evaluasi Program	4	Layanan	51,810			10	4			320,520	320,520	348,360

No	Sasaran / IKK / Kegiatan / KRO / RO / Komponen	Tahun 2023			Prakiraan Maju								
		Volume	Satuan	Alokasi (Juta)	Volume				Alokasi (Juta)				
					2020	2021	2022	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	Layanan	15,580			31	30	12,497,344	12,636,221	14,214,617	15,428,310	15,935,365
	Layanan BMN	2	Layanan	38,970			5	4			53,110	65,270	52,980
	Layanan Hukum	4	Layanan	9,900			3	3		10,040	10,940	27,500	16,380
	Layanan Hubungan Masyarakat	6	Layanan	256,522			3	2		23,520	70,680	46,280	40,770
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	12	Bulan	14,315,489			4	4		10,190	10,090	10,190	15,900
	Layanan Umum	1	Unit	4,057,150	1	1	4	5	212,900	56,260	73,132	73,232	107,216
	Layanan Perkantoran	1	Unit	4,057,150	1	1	12	12	12,284,444	12,536,211	13,996,665	15,089,938	15,702,119
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	77	Orang	154,720			121	71		389,551	4,269,940	2,820,225	566,900
	Layanan Sarana Internal	70	Orang	79,310			120	71		389,551	800,000	390,000	556,900
	Layanan Prasarana Internal	7	Orang	75,410			1				3,469,940	2,430,225	
	Layanan Manajemen SDM Internal	31	Dokumen	545,050			84	75	203,120	123,220	172,880	191,780	251,500
	Layanan Manajemen SDM	6	Dokumen	106,140	1	1	74	65	203,120	123,220	62,760	115,620	106,400
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	19	Dokumen	345,240			10	10			110,120	76,160	145,100
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4	Dokumen	64,080	3	3	29	29	669,532	410,742	256,458	275,150	341,060
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Dokumen	29,590	1	1	4	4	130,760	90,240	115,040	115,040	156,780
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	31	Layanan	14,688,271	1	1	19	19	379,532	203,340	47,990	48,140	84,830
	Layanan Manajemen Keuangan	4	Layanan	51,810	1	1	4	4	159,240	117,162	64,363	82,380	64,080
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3	Layanan	15,580			2	2			29,065	29,590	35,370

B. Sumber Pendanaan

Kode	Kegiatan / KRO / RO	Alokasi (juta)		Jumlah (Juta)
		Rupiah Murni (RM)	PNBP	
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			4,085,478
4249.PEA	Koordinasi			72,930
4249.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		72,930	72,930
4249.QAA	Pelayanan Publik Pada Masyarakat			866,035
4249.QAA.011	Pelayanan Kesehatan Haji		677,545	677,545
4249.QAA.012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas		208,490	208,490
4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya			944,703
4249.QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan		103,738	103,738
4249.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut		38,880	38,880
4249.QAH.U02	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara		204,000	204,000
4249.QAH.U04	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus		174,600	174,600
4249.QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD		42,712	42,712
4249.QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes		162,855	162,855
4249.QAH.U09	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare		38,400	38,400
4249.QAH.U11	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD		32,640	32,640
4249.QAH.U12	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria		18,240	18,240
4249.QAH.U13	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare		38,400	38,400
4249.QAH.U14	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS		25,480	25,480
4249.QAH.U15	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB		54,150	54,150
4249.QAH.U20	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria		17,400	17,400
4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan			1,816,630
4249.RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan Di Pintu Masuk	150,000	1,666,630	1,816,630
4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal			365,180
4249.TBC.001	Pelatihan Kesehatan		365,180	365,180

Kode	Kegiatan / KRO / RO	Alokasi (juta)		Jumlah (Juta)
		Rupiah Murni (RM)	PNBP	
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			19,445,191
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			12,559,734
4815.EBA.956	Layanan BMN	51,810		51,810
4815.EBA.957	Layanan Hukum	15,580		15,580
4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	38,970		38,970
4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	9,900		9,900
4815.EBA.962	Layanan Umum	256,522		256,522
4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	14,315,489		14,315,489
4815.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			4,057,150
4815.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	4,057,150		4,057,150
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			154,720
4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	79,310		79,310
4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	75,410		75,410
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			545,050
4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	106,140		106,140
4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	345,240		345,240
4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	64,080		64,080
4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	29,590		29,590
Total Pendanaan		19,595,191	3,935,478	23,530,669



Banjarmasin, 18 Juli 2022

Kepala Kantor,

H. Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP 196709171990031001